



---

Judul	: Masinton galang dukungan usulan hak angket
Tanggal	: Kamis, 02 Nopember 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 4

# Masinton Galang Dukungan Usulan Hak Angket

ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres-cawapres. Sesuai aturan, usulan itu harus didukung minimal 25 anggota DPR lintas fraksi.

"Saya coba kontak lagi ke teman-teman, ya, lintas fraksilah," kata Masinton di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia berharap banyak anggota DPR yang mendukung langkah konstitusionalnya tersebut. "Karena kita punya semangat yang sama untuk menegakkan konstitusi dan undang-undang ini secara baik dan benar agar kita punya kewarasannya yang samalah, ya. Demokrasinya berjalan tanpa ada paksaan dan melanggar aturan," ucap Masinton.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengaku bingung terkait putusan MK dijadikan objek hak angket DPR. "Ya, saya pikir kita, sih, tersenyum ya, mana tahu lah, maa sih keputusan MK dijadikan objek hak angket, ya, kan," katanya.

Habiburokhman mengatakan hak angket

dilakukan dalam konteks pengawasan ke eksekutif. Bila hak konstitusional DPR itu dilakukan untuk ranah yudikatif, itu dinilai tidak pas.

"Yudikatif itu kalau di *trias politica* lembaga lain lagi enggak bisa jadi objek hak angket gitu, lo. Jadi kalau ada orang yang mengajukan hak angket, apalagi latar belakang politik, kan, kita tahu kan, ya, enggak? Ya, silakan sajalah dia bernari nari sampai puas hatinya. Tapi menurut saya, ini aduh bikin kita bingung," ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Masinton mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap putusan MK terkait dengan syarat pencalonan capres dan cawapres. Hal itu ia sampaikan dalam interupsi para rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024.

"Saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV, menggunakan hak konstitusional saya untuk melakukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Kita tegak lurus terhadap konstitusi," kata Masinton di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). (Fah/P-2)